



LAPORAN PENILAIAN

Tentang

**Pengaduan ke-3 Keprihatinan Komunitas dan Masyarakat Sipil Terkait Dengan Kegiatan
Kelompok Perusahaan Wilmar di Indonesia**

Juli 2012

Kantor Penasihat Kepatuhan Ombudsman

Korporasi Keuangan Internasional /

Badan Penjamin Investasi Multilateral

www.cao-ombudsman.org

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	1
1. Pendahuluan	2
2. Proyek	2
3. Pengaduan	3
4. Proses dan Penilaian CAO	4
4.1 Kegiatan Penilaian	4
4.2. Temuan Penilaian	5
5. Kesimpulan dan Langkah Berikutnya	6
5.1 Melakukan Proses Penyelesaian Sengketa Ombudsman	6
5.2 Peningkatan Kapasitas	7
Lampiran 1: Proses CAO	8
Lampiran 2: Jadwal Rapat	9

DAFTAR SINGKATAN

BRIMOB	Brigade Mobil Polisi
CAO	Kantor Penasihat Kepatuhan/Ombudsman
CPO	Minyak Kelapa Sawit Mentah
CSA	Organisasi Masyarakat Sipil
ESIA	Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
FPIC	Bebas Persetujuan Sebelumnya dan yang Diinformasikan
FPP	Program Masyarakat Hutan
HGU	Hak Guna Usaha
IFC	Korporasi Keuangan Internasional
MIGA	Badan Penjamin Investasi Multilateral
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat
RSPO	Meja Bundar tentang Minyak Sawit Berkelanjutan
SAD	Suku Anak Dalam (Sebuah kelompok masyarakat adat di Provinsi Jambi)
SPI	Ringkasan Investasi yang Diusulkan

1. PENDAHULUAN

Kantor Penasehat Kepatuhan Ombudsman (CAO) adalah mekanisme bantuan independen untuk Korporasi Keuangan Internasional (IFC) dan Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA) dari Kelompok Bank Dunia. CAO melapor secara langsung kepada Presiden Kelompok Bank Dunia. Tugasnya adalah untuk membantu dalam menangani pengaduan dari orang yang terkena dampak proyek-proyek yang didukung IFC/MIGA dengan cara yang adil, obyektif, dan konstruktif dan untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan dari proyek-proyek tersebut.

Tujuan dari penilaian CAO adalah untuk: (1) memperjelas persoalan dan masalah yang timbul dalam pengaduan tersebut, (2) mengumpulkan informasi tentang bagaimana pihak terkait melihat situasi; dan (3) membantu pemangku kepentingan memahami dan menentukan apakah solusi kolaboratif dimungkinkan melalui suatu proses yang difasilitasi oleh Ombudsman CAO, atau apakah kasus tersebut harus ditangani melalui Kepatuhan CAO.

Dokumen ini adalah ringkasan dari pandangan yang didengar oleh tim CAO dan penjelasan tentang langkah-langkah berikutnya dalam proses CAO. Laporan penilaian tidak mengklaim untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang semua masalah yang timbul dalam pengaduan atau masukan yang diterima dari pihak terkait. *CAO tidak membuat keputusan apapun mengenai manfaat dari pengaduan.*

Lampiran 1 menyajikan langkah-langkah proses CAO dalam menanggapi pengaduan.

2. PROYEK

Beroperasi di Asia, Eropa Timur, dan Afrika, Kelompok Wilmar adalah konglomerat agribisnis besar yang mengkhususkan diri dalam produksi dan perdagangan minyak sawit. Sejak tahun 2003, IFC telah membuat empat investasi di Kelompok Wilmar, dua dari mereka di perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura dan dua di penyulingan minyak sawit di Ukraina.¹ Sebagai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, sepertiga sumber kelapa sawit Kelompok Wilmar kebanyakan dari konsesi perkebunan sendiri, baik yang dimiliki sepenuhnya maupun secara mayoritas, dan merupakan bagian dari rantai pasokannya di Indonesia.

Ketika CAO menerima pengaduan ini pada bulan November 2011, dua investasi IFC di Delta-Wilmar CIS, pabrik penyulingan minyak sawit di Ukraina, sedang aktif. Investasi pertama terdiri atas pinjaman USD 17.500.000 untuk membangun dan mengoperasikan pabrik penyulingan tersebut. Pada tahun 2008, IFC melakukan investasi kedua sebanyak USD 45.000.000 untuk meningkatkan kapasitas pabrik penyulingan dan infrastruktur terkait di pabrik tersebut, dengan total biaya sekitar USD 235.000.000.. IFC mendefinisikan ini sebagai proyek-proyek Lingkungan Kategori B.

¹ Proyek IFC Nomor 24644 dan 26271

Delta-Wilmar CIS merupakan perusahaan patungan 50:50 antara Wilmar International Limited dan Delta Exports Pte Limited. Delta Exports adalah pedagang komoditas curah berbasis di Singapura khusus di negara-negara bekas Uni Soviet. Pada tahun 2008, Delta-Wilmar merger dengan kelompok perusahaan Nizhny Novgorod Fats @ Oils Group (“NMGK”) di Rusia. Hasilnya, komposisi kepemilikan Delta-Wilmar saat ini masing-masing adalah 48% oleh Wilmar Internasional, 10% oleh Delta Exports, and 42% oleh NMGK . Di Rusia, NMGK adalah salah satu perusahaan penghasil minyak terbesar.

3. PENGADUAN

Koalisi dari pengadu

Pada tanggal 9 November 2011, Kantor Penasehat Kepatuhan Ombudsman (CAO) menerima pengaduan dari tiga kelompok masyarakat lokal - SAD 113, SAD Mat Ukup dan Kelompok Zainal / Sungai Beruang (semuanya adalah sub kelompok dari SAD Suku Batin Sembilan) yang didukung oleh 17 organisasi masyarakat sipil lokal, nasional dan internasional, diantaranya termasuk Program Masyarakat Hutan (Forest People Program), SawitWatch, HuMA, Setara, Lembaga Gemawan, Save Our Borneo.

Sejarah pengaduan ke CAO tentang operasi Wilmar

Ini merupakan pengaduan yang ketiga diterima oleh CAO mengenai investasi IFC dalam Kelompok Wilmar. Pengaduan pertama disampaikan pada bulan Juli 2007 dan dikemukakan berkaitan dengan pengaduan beberapa kelompok masyarakat terkait operasi Wilmar di Sambas. Ini diselesaikan dengan penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Ombudsman CAO, serta audit kepatuhan penanganan IFC atas investasi di Wilmar Group oleh fungsi Kepatuhan CAO.² CAO terus memantau pelaksanaan perjanjian.

Pengaduan kedua, diterima oleh CAO pada bulan Desember 2008, diselesaikan dengan tim Ombudsman CAO yang memainkan peran mentoring ditujukan untuk memperkuat mekanisme lokal dalam tiga proses penyelesaian sengketa lokal sudah berlangsung di Jambi dan Pekanbaru, Indonesia.³ Proses ini menghasilkan kesepakatan antara para pihak di Riau, sedangkan proses di Jambi belum mencapai penyelesaian yang memuaskan pada saat CAO menerima pengaduan yang ketiga. Kedua kelompok masyarakat SAD terlibat dalam proses Jambi telah kembali mengajukan klaim kepada CAO dalam pengaduan ketiga dan keprihatinan mereka akan ditangani melalui proses ini. CAO sekarang telah menutup pengaduan Wilmar Kedua, dan meringkaskan keterlibatannya dalam laporan kesimpulan yang tersedia di situs web CAO di www.cao-ombudsman.org.

Ketiga pengaduan tersebut mengemukakan kekhawatiran tentang beberapa operasi Wilmar di Indonesia yang dialami oleh penandatanganan masyarakat tempatan.

² Rincian lebih lanjut tersedia di http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=76

³ Rincian lebih lanjut tersedia di http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=79

Permasalahan yang muncul dalam pengaduan saat ini

Surat pengaduan mengangkat keprihatinan sosial dan lingkungan tertentu mengenai PT Asiatic Persada (PT AP) - mayoritas milik anak perusahaan Wilmar yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Jambi, Indonesia. Pengaduan ini berhubungan secara khusus kepada kelompok masyarakat adat yang berada di sekitar konsesi PT AP di Jambi, dan dalam arti luas mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengusuran paksa sekitar 83 anggota masyarakat oleh personil perkebunan dan BRIMOB (Polisi Brigade Mobil) yang aktif mengamankan perkebunan disertai dengan kekerasan dan perusakan tempat tinggal dan harta pribadi anggota masyarakat.
2. Belum terselesaikannya tanah sengketa yang melibatkan tanah adat dari masyarakat Batin Sembilan. Masyarakat berpendapat bahwa tanah tersebut diperoleh tanpa persetujuan mereka, dan telah dibuka dan ditanami tanpa memberikan kompensasi.
3. Berkenaan dengan proses mediasi Jambi, upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksakan penyelesaian yang tidak sejalan dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh para pihak dan bertentangan dengan Standar Kinerja IFC.

Pengaduan juga mengartikulasikan keprihatinan yang lebih luas mengenai berulang sengketa sekitar pembebasan lahan bahwa pengadu telah mengidentifikasi di perkebunan Wilmar dan anak perusahaannya, dan mempertanyakan efektivitas perusahaan dalam menangani masalah ini secara sistematis.

Dalam pengaduan, para pengadu meminta agar masalah-masalah berikut harus dipertimbangkan dalam proses pengaduan:

1. Mediasi atas penyelesaian yang dinegosiasikan antara masyarakat yang terkena dampak dan PT AP / Wilmar, dengan Fasilitas Penyelesaian Sengketa RSPO yang baru terbentuk sebagai pengamat;
2. Tinjauan partisipatif dan independen terhadap operasi minyak sawit Kelompok Wilmar karena terkait dengan pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa;
3. Dimana ada konflik tanah yang tak terselesaikan lainnya diidentifikasi, mediasi konflik dilakukan di wilayah tersebut;
4. Adopsi cara-cara efektif oleh Kelompok Wilmar untuk secara sistematis mengatasi konflik tanah di kebun kelapa sawitnya.

4. PROSES Dan PENILAIAN CAO

Keputusan kelayakan CAO

CAO menyatakan pengaduan memenuhi syarat untuk penilaian lebih lanjut pada tanggal 17 November 2011, berdasarkan temuan bahwa:

1. Pengaduan berkaitan dengan sebuah proyek yang mana IFC / MIGA berpartisipasi didalamnya, atau secara aktif mempertimbangkan.
2. Masalah yang diangkat dalam pengaduan berkaitan dengan mandat CAO untuk mengatasi dampak lingkungan dan social dari investasi IFC / MIGA.
3. Pengadu (atau mereka yang pengadu memiliki kewenangan untuk mewakili) dapat terpengaruh jika dampak sosial dan / atau lingkungan yang diangkat dalam pengaduan tersebut terjadi.

Keputusan kelayakan CAO memperhitungkan bahwa operasi yang menjadi kekhawatiran dalam pengaduan secara langsung terkait dengan investasi IFC dalam Delta-Wilmar CIS melalui rantai pasokannya.

4.1 Kegiatan Penilaian

Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaiannya, tim CAO melakukan sekitar 30 wawancara, pertemuan / diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan ke Jambi pada Desember 2011 dan Januari-Februari 2012. Dalam persiapan dan selama kunjungan lapangan, CAO mereview dokumen proyek IFC, dan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengadu dan kelompok masyarakat dalam majelis umum, perusahaan, perwakilan pemerintah provinsi yang terkait, dan tim proyek IFC. Daftar lengkap dari pertemuan diringkas dalam Tabel 1 sebagaimana terlampir.

Pertemuan pemangku kepentingan yang pertama

Pada tanggal 29 Nopember 2011, para pengadu mengundang stakeholder yang terkait dan CAO ke pertemuan pembukaan di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan Wilmar Internasional (10 orang), pengadu (8 orang), CAO (3 orang), RSPO (1 orang), Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batanghari (4 orang), dan penerjemah (1 orang). Pada pertemuan pertama, para pihak (pengadu, Wilmar International, dan pemerintah provinsi dan kabupaten) menyambut keterlibatan CAO dalam kapasitas penyelesaian sengketa.

Para pihak memiliki harapan yang berbeda, bagaimanapun, tentang peran sebenarnya CAO: pengadu dan perusahaan menyatakan harapan mereka bahwa CAO berfungsi sebagai mediator, sementara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diharapkan bahwa layanan fasilitasi CAO diintegrasikan ke dalam berbagai proses yang sedang berlangsung dan tim resolusi konflik. CAO menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari peran penilaian untuk

mengeksplorasi peran yang paling cocok untuk CAO, sehingga peran CAO akan diterima oleh semua pihak.

Kunjungan Penilaian ke Jambi

Tim CAO melakukan tiga kunjungan ke Jambi selama Desember dan Januari. Dua kunjungan yang pertama difokuskan mengenai belajar tentang isu-isu dalam pengaduan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Pada kunjungan pertama selama tanggal 10-14 Desember 2011, CAO bertemu dengan penandatangan pengaduan tersebut, kelompok masyarakat yang terkena dampak, PT AP, unit Pemerintah Provinsi Jambi, unit dari Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan unit Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Tim CAO kembali ke Jambi selama tanggal 27-31 Desember 2011 untuk bertemu lagi dengan kelompok masyarakat yang terkena dampak.

Kunjungan ketiga ke Jambi selama tanggal 16-20 Januari 2012 difokuskan pada mengukur peran yang paling dapat diterima untuk CAO dalam proses penyelesaian sengketa yang akan datang. CAO bertemu dengan kelompok masyarakat yang terkena dampak, PT AP, penandatangan, unit Pemerintah Provinsi Jambi dan unit Pemerintah Kabupaten Batanghari. Kunjungan ini diakhiri dengan pertemuan yang diselenggarakan oleh tim CAO, yang menyajikan temuan awal dari penilaian kasus dan dibahas pilihan peran CAO dalam resolusi konflik.

4.2 Temuan Penilaian

Pihak yang bersengketa

Lima kelompok SAD diidentifikasi sebagai masyarakat yang terkena dampak dalam pengaduan dan memilih untuk berpartisipasi dalam proses penilaian CAO:

1. Dusun Lamo - Pinang Tinggi kelompok masyarakat yang terkena dampak.
2. Masyarakat Sungai Beruang:
 - a. Kelompok Sungai Beruang yang digusur menyebar di Jembatan Besi, Danau Minang, dan Buayan Ilir.
 - b. Kelompok Dusun Sungai Beruang.
3. Kelompok masyarakat Terawang.
4. KOPSAD / Kelompok Tani Persada.

Penandatangan lokal memainkan peran yang sangat penting dengan memberikan dukungan dalam komunikasi dan koordinasi dengan kelompok masyarakat yang terkena dampak.

Masalah-masalah

Masalah-masalah, seperti yang disuarakan dalam konteks proses penilaian CAO, diringkas dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2: Masalah-masalah

Pemangku kepentingan	Masalah utama dari pengaduan
Kelompok masyarakat terdampak Dusun Lamo - Pinang Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim lahan di Dusun Lamo – Pinang Tinggi
Kelompok Tergusur Lingkungan/RT 13 Dusun Sungai Beruang	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi untuk rumah yang dibongkar karena pengusiran keluarga/rumah tangga yang tinggal di lahan yang disengketakan di areal konsesi PT AP. • Pengembalian tanah untuk keluarga-keluarga tertentu.
Kelompok masyarakat terdampak Dusun Sungai Beruang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim lahan di area konsesi PT AP sebagai daerah basis bagi masyarakat Sungai Beruang.
Kelompok masyarakat terdampak Terawang	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim bahwa area perkebunan PT AP memasuki area dusun Terawang. • Menuntut PT AP merekonstruksi batas konsesi dalam rangka menjaga HGU (Hak Guna Usaha) PT AP.
KOPSAD / Kelompok Tani Persada	<ul style="list-style-type: none"> • Menuntut PT AP menyerahkan lahan perkebunan kelapa sawit dan areal permukiman kepada kelompok tani Persada, sesuai dengan Perjanjian Tepian Ratu.
Penandatanganan CSO	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa PT AP dan Wilmar Group harus memenuhi Kinerja Standar IFC dan Prinsip dan Kriteria RSPO, termasuk penerapan FPIC. • Sengketa tanah dalam operasi Wilmar yang lebih besar dan rantai pasokan selain dari komunitas yang diidentifikasi dalam pengaduan ini.
PT AP dan Wilmar	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mempertahankan areal konsesi • Perusahaan bersedia membayar kompensasi atas klaim tanah, selama pengadu memiliki bukti yang dapat diterima.

5. KESIMPULAN DAN LANGKAH BERIKUTNYA

5.1 Melakukan Ombudsman Proses Penyelesaian Sengketa

Kelompok-kelompok masyarakat, PT AP dan unit pemerintah lokal semua menunjukkan kesediaan kuat untuk menangani dan menyelesaikan sengketa melalui dialog dan negosiasi.

Masalah yang diangkat dalam pengaduan ini sangat kompleks dan melibatkan sejumlah besar kelompok masyarakat yang terkena dampak, serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan diskusi dengan pemangku kunci, CAO mendengar dan mengerti bahwa lingkup untuk dialog yang dimediasi akan menegenai isu-isu Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali, Masyarakat Adat, dan Warisan Budaya, sebagaimana termaktub di dalam Standar Kinerja IFC 5, 7 dan 8.

Selama masa penilaian CAO, proses penyelesaian sedang berlangsung di tingkat kabupaten dan pemerintah provinsi. Semua pihak menyetujui untuk sebuah proses di mana CAO akan bekerja sama dengan kedua tataran pemerintah untuk berupaya mencapai solusi melalui memediasi kekhawatiran para pihak. Atas kesepakatan para pihak, mediasi akan dilakukan oleh Tim Mediasi Bersama terdiri dari anggota tim CAO dan staf dari unit pemerintah setempat yang terkait. Tim Mediasi Bersama ini akan didukung oleh Keputusan Resmi Gubernur Provinsi Jambi. Proses mediasi dimulai pada bulan Maret 2012.

5.2 Peningkatan Kapasitas

Selama penilaian, pihak-pihak menyatakan perlunya untuk menerima peningkatan kapasitas sebagai bagian dari memperkuat kesiapan mereka untuk terlibat dalam proses mediasi. Kegiatan pengembangan kapasitas dapat berbentuk pelatihan dari perwakilan manajemen tentang negosiasi, mencakup baik pelatihan dalam ruangan maupun lapangan untuk kelompok masyarakat terdampak dan PT AP. Kapasitas kegiatan pembangunan juga terbuka untuk penandatanganan lokal dan anggota tim mediasi dari pemerintah lokal.

LAMPIRAN 1:

Sesuai Pedoman Operasional CAO,⁴ langkah-langkah berikut biasanya diikuti dalam menanggapi pengaduan yang diterima:

- Langkah 1: Pengakuan penerimaan pengaduan
- Langkah 2: Persyaratan: Penentuan kelayakan pengaduan untuk penilaian berdasarkan mandat CAO (tidak lebih dari 15 hari kerja)
- Langkah 3: Penilaian Ombudsman: Penilaian situasi dan membantu para pihak dalam memahami dan menentukan apakah solusi kolaboratif adalah mungkin melalui proses yang difasilitasi oleh Ombudsman CAO, atau apakah kasus tersebut harus dialihkan ke Kepatuhan CAO untuk penilaian kinerja sosial dan lingkungan IFC / MIGA. Periode penilaian dapat berlangsung hingga maksimal 120 hari kerja.
- Langkah 4: Memfasilitasi penyelesaian: Jika para pihak bersedia untuk terlibat dalam proses Ombudsman CAO, fase ini melibatkan awal dari sebuah proses penyelesaian sengketa (biasanya didasarkan atau diprakarsai oleh Nota Kesepahaman dan / atau aturan dasar yang telah disetujui bersama antara pihak-pihak) melalui fasilitasi / mediasi, proses resolusi bersama pencari fakta, atau lainnya yang disetujui, yang menyebabkan perjanjian penyelesaian atau tujuan yang disepakati bersama dan lain yang sesuai. Tujuan utama dari pendekatan pemecahan masalah adalah untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam pengaduan, dan setiap isu-isu lain yang signifikan yang relevan dengan pengaduan yang diidentifikasi selama penilaian atau proses pemecahan masalah, dengan cara yang dapat diterima oleh para pihak terdampak.

ATAU

Penilaian Kepatuhan / Audit: Jika pengaduan tersebut dialihkan ke Kepatuhan CAO untuk tinjauan kepatuhan, Kepatuhan CAO akan memulai penilaian sosial dan lingkungan IFC / MIGA uji tuntas dari proyek yang bersangkutan untuk menentukan apakah kasus memperhitungkan audit kepatuhan intervensi IFC / MIGA dalam proyek. Proses penilaian Kepatuhan dapat berlangsung hingga maksimal 45 hari kerja.

Langkah 5: Pemantauan dan tindak lanjut

Langkah 6: Kesimpulan / Penutupan Kasus

⁴ Untuk lebih rinci mengenai peran dan pekerjaan dari CAO, silahkan mengacu pada Panduan Operasional penuh: <http://www.cao-ombudsman.org/about/whoweare/index.html>

LAMPIRAN 2:

Tabel 1: Jadwal Pertemuan dan kunjungan lokasi, Bulan Desember 2011 - Februari 2012.

Tanggal dan Tempat	Pihak/Kelompok/Peserta
10 Desember 2011 Lokasi: Kantor CAPP	Setara, AGRA Jambi dan Penandatanganan lainnya. Jumlah peserta: sekitar 15 orang
11 Desember 2011 Lokasi: Pinang Tinggi SAD Komunitas Pusat 113	Pertemuan dengan Komunitas SAD terdampak 113 kelompok Jumlah peserta: sekitar 50 orang
11 Desember 2011 Lokasi: Hotel Grand Abadi, Jambi	Pertemuan makan malam dengan WILMAR dan PT AP Jumlah peserta: 15 orang
12 Desember 2011 Lokasi: Sei Beruang	Pertemuan dengan Komunitas terdampak Sei Beruang dan Kelompok tergusur. Jumlah peserta: 30 orang
12 Desember 2011 Lokasi: Kantor Bupati Batanghari	Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari Jumlah peserta: 15 orang
12 Desember 2011 Lokasi: Kantor CAPP	Diskusi dengan Penandatanganan Jumlah peserta: 20 orang
13 Desember 2011 Lokasi: Kantor Gubernur Jambi	Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah peserta: 25 orang
13 Desember 2011 Lokasi: Kantor IFC Jakarta	Pertemuan dengan staff kantor perwakilan IFC Indonesia Jumlah peserta: 5 orang
28 Desember 2011 Lokasi: Kantor Pemerintah Provinsi Jambi	Pertemuan kesaksian antara PT AP dan Kelompok Tergusur Sei Beruang Jumlah peserta: sekitar 50 orang
28 Desember 2011 Lokasi: Hotel Grand Abadi Jambi	Pertemuan dengan Mahyuddin Jumlah peserta: 5 orang
28 Desember 2011 Lokasi: Hotel Grand Abadi Jambi	Pertemuan dengan PRD dan STN Jumlah peserta: 5 orang
29 Desember 2011 Lokasi: Dusun Sei Beruang	Pertemuan dengan komunitas terdampak Dusun Sei Beruang Jumlah peserta: 15 orang
30 Desember 2011 Lokasi: Dusun Tanah Menang	Pertemuan dengan Kelompok Tanah Menang Jumlah peserta: 12 orang
17 Januari 2012 Lokasi: Kantor Setara	Pertemuan dengan perwakilan SAD Jumlah peserta: 15 orang
18 Januari 2012 Lokasi: Kantor PT AP	Pertemuan dengan PT AP Jumlah peserta: 10 orang
18 Januari 2012 Lokasi: Kantor Bupati Batanghari	Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari Jumlah peserta: 8 orang

19 Januari 2012 Lokasi: Kantor Gubernur Jambi	Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah peserta: 15 orang
19 Januari 2012 Lokasi: Kantor Setara	Pertemuan dengan Penandatanganan di Jambi Jumlah peserta: 15 orang
20 Januari 2012 Lokasi: Hotel Grand Abadi Jambi	Pertemuan dengan semua pihak untuk mempresentasikan hasil penilaian awal Jumlah peserta: 55 orang
20 Januari 2012 Lokasi: Kantor HuMA, Jakarta	Pertemuan dengan FPP. Jumlah peserta: 4 orang.
26 Januari 2012 Lokasi: Kedai Telapak Bogor	Pertemuan Koordinasi Tim CAO Jumlah peserta: 3 orang
3 Februari 2012 Lokasi: Dusun Terawang	Pertemuan dengan Kelompok terdampak Terawang Jumlah peserta: 75
4 Februari 2012 Lokasi: Hotel Novita Jambi	Pertemuan dengan PT AP Jumlah peserta: 6 orang
5 Februari 2012 Lokasi: Dusun Penyerukan	Pertemuan dengan Kelompok terdampak Pinang Tinggi Jumlah peserta: 30 orang
5 Februari 2012 Lokasi: Dusun Sei Beruang	Pertemuan dengan Kelompok terdampak Sei Beruang Jumlah peserta: 7 orang
6 Februari 2012 Lokasi: Kantor Setara	Pertemuan dengan Penandatanganan di Jambi Jumlah peserta: 10 orang
11 Februari 2012 Lokasi: Kantor HuMA	Pertemuan dengan Penandatanganan di Jakarta Jumlah peserta: 3
14 Februari 2012 Lokasi: Kantor Gubernur Jambi	Pertemuan Tim Mediasi Gabungan Jumlah peserta: 10 orang
15 Februari 2012 Lokasi: Hotel Golden Harvest Jambi	Pertemuan dengan PT AP Jumlah peserta: 5 orang
16 Februari 2012 Lokasi: Hotel Golden Harvest Jambi	Pertemuan untuk memulai mediasi Jumlah peserta: 56 orang